

**TESIS**

**PENGUNAAN HAK INKAR DALAM PEMBERIAN KESAKSIAN  
OLEH NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata-2  
Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana  
Universitas Andalas*



**Pembimbing I :**

**Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH**

**NIP : 195910101987021002**

**Pembimbing II :**

**H. Ilhamdi Taufik, SH., MH**

**NIP : 195610251986031012**

**Oleh :**

**YUDI PRATAMA**

**1420123078**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

# **PENGUNAAN HAK INKAR DALAM PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA**

( YUDI PRATAMA, 1420123078, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Program  
Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 118 halaman, tahun 2017 )

## **ABSTRAK**

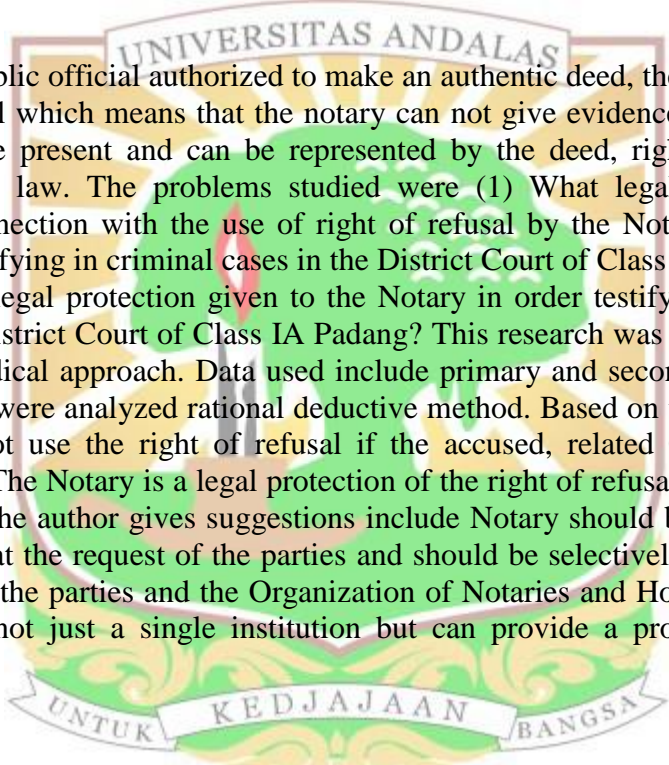
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Notaris memiliki hak ingkar yang artinya Notaris dapat tidak memberikan keterangan pada saat persidangan ataupun dapat untuk tidak hadir dan dapat diwakilkan oleh akta, hak ingkar dijamin oleh undang-undang. Permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan hak ingkar oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pemberian kesaksian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ? (2) Bagaimanakah Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam rangka pemberian kesaksian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara metode deduktif rasional. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkar apabila menjadi terdakwa, terkait Tindak Pidana Korupsi dan Perpajakan, (2) Bentuk perlindungan hukum Notaris adalah hak ingkar tersebut, yang diberikan oleh undang-undang. Pada penulisan tesis ini penulis memberikan saran diantaranya Notaris harus lebih hati-hati dalam pembuatan akta yang atas permintaan para pihak dan harus selektif melihat data diri para pihak dan Organisasi Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris bukan hanya sebuah lembaga saja tapi dapat memberikan suatu perlindungan bagi Notaris.

*Kata Kunci : Notaris, Hak Ingkar, Perkara Pidana*

## USE RIGHT OF REFUSAL IN GIVING TESTIMONY BY NOTARY IN CRIMINAL CASE

(YUDI PRATAMA, 1420123078, Post Graduate Program Master of Notary Law  
Faculty, University of Andalas, 118 pages, 2017)

### ABSTRACT



Notary is a public official authorized to make an authentic deed, the notary has the right of refusal which means that the notary can not give evidence at the hearing or may not be present and can be represented by the deed, right of refusal is guaranteed by law. The problems studied were (1) What legal consequences arising in connection with the use of right of refusal by the Notary as a public official in testifying in criminal cases in the District Court of Class IA Padang? (2) How can the legal protection given to the Notary in order testifying in criminal cases in the District Court of Class IA Padang? This research was conducted with empirical juridical approach. Data used include primary and secondary data. The data obtained were analyzed rational deductive method. Based on the research (1) Notary can not use the right of refusal if the accused, related Corruption and Taxation, (2) The Notary is a legal protection of the right of refusal, given by law. In this thesis the author gives suggestions include Notary should be more careful in the deed that the request of the parties and should be selectively view the data themselves of the parties and the Organization of Notaries and Honorary Council of Notary is not just a single institution but can provide a protection for the Notary.

*Keywords: Notary, Dissenters Rights, Criminal case*